

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan mempunyai tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan dapat dijadikan tolak ukur bagi pengguna untuk menilai suatu perusahaan karena laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Informasi laporan keuangan merupakan unsur penting bagi investor, kreditor dan pelaku bisnis lainnya. Informasi yang dihasilkan laporan keuangan akan sangat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan apabila informasi tersebut relevan dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

Kegiatan pelaporan keuangan dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan pengguna sebagai bahan pengambilan keputusan. Agar informasi keuangan dapat digunakan sebagaimana yang diharapkan pengguna, maka informasi tersebut harus disusun dengan memenuhi karakteristik atau persyaratan tertentu. Laporan Keuangan harus memiliki karakteristik dalam mewujudkan kualitasnya. Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan yaitu ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat dipenuhi kewajibannya. Nordiawan (2010: 44). Laporan Keuangan memiliki empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitasnya, karakteristik kualitatif laporan keuangan

Keputusan kontrak yang berdasar kualitas laporan keuangan yang rendah akan mempengaruhi transfer kesejahteraan yang tidak diinginkan. Dari perspektif investasi kualitas laporan keuangan yang rendah akan menyebabkan tidak efektifnya alokasi sumber daya. Kualitas laporan keuangan yang rendah menyebabkan *ineffisiensi* karena mengurangi pertumbuhan ekonomi yang disebabkan alokasi modal yang tidak tepat. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Emilda, 2014).

Kriteria tersebut di atas merujuk pada informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Murphy (dalam Payanta, 2016: 83) bahwa kualitas laporan keuangan akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan yakin dalam mengambil keputusan karena didasarkan pada informasi yang telah dipersiapkan dengan baik, disetujui dan diaudit secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan menyajikan informasi yang benar dan jujur. Hal ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan menunjukkan konsep kualitas informasi dari laporan tersebut.

Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat untuk diperbincangkan, banyaknya kasus-kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini merupakan bukti dari kurangnya pemahaman standar akuntansi pemerintah dan buruknya sistem pengelolaan keuangan daerah, kurangnya kompetensi yang dimiliki staf akuntansi serta buruknya sistem pengendalian intern sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan bagi suatu organisasi. Sehingga salah satu faktor krusial dalam pelaporan keuangan yang berkualitas yakni sistem pengendalian intern.

Arens, Elder dan Beasley (2011: 412) mengemukakan bahwa pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen. Sistem pengendalian intern adalah sebagai rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinasi dan pengukuran-pengukuran yang diterapkan di perusahaan. Metode tersebut dilakukan untuk mengamankan aktiva, memeriksa keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Sementara itu, Hongren dan Harrison (2011: 390) pengendalian internal (*Internal Control*) adalah rencana organisasioanal dan semua tindakan terkait yang dirancang untuk mengamankan aktiva, mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan, meningkatkan efesiensi operasi dan memastikan catatan akuntansi yang akurat dan diandalkan

Pengendalian intern yang digunakan dalam suatu entitas merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas

(Mulyadi, 2014:179). Lebih lanjut Hartadi (2015:3) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. Agoes (2014: 75) mengemukakan lima komponen pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Dan sesuai dengan pernyataan IAI (2012: 5) bahwa terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

Terkait dengan penjelasan di atas maka penelitian ini dilakukan pada PT Pos Indonesia Cabang Gorontalo. Kantor Pos Gorontalo terletak di Jalan Nani Wartabone No. 15 RT.01 RW.01 Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Lokasi tersebut berada di salah satu jalan utama yang berada di Kota Gorontalo, tepat berada di depan Kantor Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Gorontalo. Sepintas yang kita tahu bahwa Kantor Pos Gorontalo adalah tempat di mana hanya tempat untuk mengirim surat atau mencairkan uang dalam bentuk paket program pemerintah. Dulu, namanya ketika dibangun oleh Belanda pada tahun 1910-an bernama Kantor Pos dan Telegraf. Jadi, semenjak didirikan hingga kini masih berfungsi sebagai Kantor Pos, hanya saja fungsi telegrafnya sudah tidak beroperasi lagi, dan kepemilikannya sekarang oleh PT. Pos Indonesia

Permasalahan mengenai pelaporan keuangan oleh PT Pos Indonesia secara umum yakni penyimpangan pemberian dana tantiem (Bonus) kepada Direksi dan Komisaris PT Pos Indonesia dan penjualan di bawah harga wajar saham PT Pos di Bank Mantap. PT. Pos Indonesia telah memberikan atau membayarkan sejumlah uang Rp5,3 Miliar kepada Direksi dan Komisaris pada tahun 2017. Padahal kondisi PT. Pos Indonesia berdasar laporan keuangan sedang mengalami kerugian alias merugi pada tahun yang sama berdasar neraca pembukuan keuangan. PT Pos berdalil pada tahun pemberian tantiem 2017 sedang untung Rp24 miliar. Jika mengacu keuntungan hanya sebesar Rp24 miliar, pemberian tantiem tidak boleh sebesar Rp5,3 miliar, Semestinya tantiem hanya sebesar Rp1,2 M, sehingga selisihnya adalah kerugian negara.

PT Pos Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dapat mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan hasil usahanya kepada pemegang saham, seluruh pegawai, pelanggan dan stakeholder lainnya. Untuk mencapai tujuan dimaksud, Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Pos Indonesia (Persero) selaku unit fungsional yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama dituntut berperan optimal membantu Direktur Utama menjalankan fungsi pengawasan. SPI harus mampu memberikan masukan dan rekomendasi terhadap kelemahan sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan operasional dan keuangan, baik menyangkut ketaatan peraturan, penilaian efisiensi dan efektifitas kegiatan dari seluruh lini organisasi di lingkungan perusahaan. Dalam mengemban tugas dan fungsi tersebut, SPI dituntut untuk selalu meningkatkan

kompetensi dan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, objektif, independen dan menjunjung tinggi kode etik serta standar audit.

Sistem pengendalian intern pada perusahaan sangatlah penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada laporan keuangan. Agar SPI berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembentukannya, maka diperlukan Internal Audit Charter, sehingga dicapai pemahaman bersama terhadap tugas, fungsi dan kewenangan SPI, oleh Direksi, Komisaris dan seluruh jajaran manajemen Perusahaan. Di sisi lain, eksistensi dan pelaksanaan tugas SPI dapat diterima dan didukung oleh seluruh unit kerja di lingkungan Perusahaan, serta menjadi pedoman bagi seluruh Auditor internal SPI dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sementara itu masalah mengenai penerapan pengendalian intern secara umum di PT Pos Indonesia sebagaimana ditemukan dalam harian kompas yakni pembuatan tanda terima (kwitansi) fiktif, manipulasi data transaksi dengan cara merubah data transaksi serta merubah prosedur akuntansi atas suatu transaksi misalnya penyetoran atas suatu tagihan ke mitra yang seharusnya dilakukan dengan transfer ke rekening perusahaan oleh petugas ditagih secara tunai dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat diminimalisir apabila pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan baik. Coram et al.(2006) menjelaskan bahwa organisasi yang mempunyai fungsi pengendalian internal akan mampu mendeteksi adanya kecurangan daripada organisasi yang tidak mempunyai fungsi pengendalian internal. Hal ini memberikan bukti bahwa pengendalian internal memberikan nilai tambah melalui

peningkatan kontrol dan pemantauan lingkungan dalam organisasi untuk mendeteksi kecurangan. Wilopo (2006) juga menjelaskan bahwa semakin efektif pengendalian internal di perusahaan, semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi oleh manajemen perusahaan.

Bagian pengendalian intern sendiri pada PT Pos Indonesia khususnya di Gorontalo diberikan kepada karyawan yang telah bekerja minimal 10 tahun dan sudah mengalami minimal 5 kali rolling penempatan kerja. Bagi pengendalian intern di PT Pos Indonesia memiliki visi untuk menjadi mitra strategis yang profesional bagi kepentingan manajemen dalam mencapai tujuan Perusahaan. SPI harus mampu memberikan masukan dan rekomendasi terhadap kelemahan sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan operasional dan keuangan, baik menyangkut ketaatan peraturan, penilaian efisiensi dan efektifitas kegiatan dari seluruh lini organisasi di lingkungan perusahaan. Dalam mengemban tugas dan fungsi tersebut, SPI dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi dan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, objektif, independen dan menjunjung tinggi kode etik serta standar audit.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada temuan pra observasi dan wawancara kepada pimpinan Bapak Herriyanto S. Gampamole yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 8 Februari 2019 dimana penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan ini belum berkualitas, atau dengan kata lain belum mencerminkan informasi laporan keuangan yang berguna bagi pengguna, antara lain adanya informasi yang kurang relevan, dan informasi keuangan yang kurang andal. Salah satu penyebabnya adalah pengendalian intern yang diterapkan

perusahaan ini belum efektif, karena masih terdapat beberapa kekurangan, seperti penyusunan laporan keuangan bulanan yang sering tertunda, serta laporan keuangan harian yang bersifat manual, dan juga belum dilaksanakan pemeriksaan secara independen. Jika hal tersebut berlangsung secara terus menerus maka sangat berdampak pada proses pengambilan keputusan dan perkembangan perusahaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian sebelumnya misalnya yang dilakukan oleh Armando (2013) yang menemukan bahwa semua faktor di atas berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Artinya, jika sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah semakin baik maka nilai informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula. Untuk itu disarankan kepada pemerintah daerah melakukan pengkajian ulang mengenai sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah dalam pembuatan laporan keuangan agar mempunyai nilai informasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yakni pada fokus penelitian yakni kualitas laporan keuangan dan pengendalian intern sementara perbedaannya yakni pada analisis data yang digunakan serta locus penelitian pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka hal inilah yang mendorong penulis untuk memformulasikan judul : ***“Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dalam Pengambilan Keputusan Pada PT POS Indonesia Cabang Gorontalo”***.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Penerapan pengendalian intern di PT. Pos Indonesia belum efektif yang dapat dibuktikan dari jarang dilaksanakan pemeriksaan secara independen serta pengawasan pimpinan yang masih sangat minim pada proses kerja karyawan
2. Penyusunan laporan keuangan di PT. Pos Indonesia belum begitu optimal yang dapat dilihat dari penyusunan laporan keuangan bulanan yang sering tertunda serta laporan keuangan harian yang bersifat manual.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya maka untuk lebih mengarahkan penelitian ini penulis merumuskan masalah yakni apakah penerapan pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dalam pengambilan keputusan manajemen pada PT POS Indonesia Cabang Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh penerapan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan dalam pengambilan keputusan manajemen pada PT POS Indonesia Cabang Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran atas pengembangan ilmu manajemen, khususnya menyangkut pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan.
- 2) Sebagai bahan acuan/referensi bagi penelitian sejenis atau yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

1.5.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perusahaan PT. Pos Indonesia dalam melahirkan kebijakan strategis khususnya di bidang pengendalian intern dan laporan keuangan kualitas laporan keuangan dalam pengambilan keputusan manajemen.